

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kontribusi wajib kepada daerah yang terutang (UU No. 28 tahun 2009). Ada berbagai macam jenis pajak daerah yang akan diterima oleh Badan Pengelolaan pendapatan Daerah, diantaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, dan pajak air tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 20, pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengenaan pajak hotel tidak bersifat mutlak, Setiap daerah memiliki kewenangannya masing-masing dalam mengenakan pajak daerah, termasuk pajak hotel, sesuai dengan pertimbangan yang sudah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Tarif pajak yang dikenakan pun berbeda-beda, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Di Kabupaten Bogor, pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sedang dikembangkan kegiatan pariwisatanya. Saat ini industri pariwisata merupakan salah satu sektor di Kabupaten Bogor yang cukup berkembang pesat. Hal ini disebabkan karena tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor meningkat setiap tahunnya. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor, khususnya wisatawan mancanegara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, khususnya tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Untuk tahun 2016 jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Bogor sebanyak 8.791.300 orang (166.071 wisatawan mancanegara dan 8.625.229 wisatawan nusantara), tahun 2017 sebanyak 7.300.134 orang (355.330 wisatawan mancanegara dan 6.944.804 wisatawan nusantara), tahun 2018 sebanyak 7.513.209 orang (339.931 wisatawan mancanegara dan 7.173.278 wisatawan nusantara), sebanyak 2019 sebanyak 9.484.957 orang (287.681 wisatawan mancanegara dan 9.197.276 wisatawan nusantara) (BPS Kabupaten Bogor, 2021).

Didukung oleh banyaknya destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bogor, maka makin banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Bogor. Pengelolaan pajak hotel di Kabupaten Bogor dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pendapatan daerah Kabupaten Bogor. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bappenda Kabupaten Bogor, jumlah wajib pajak hotel yang terdapat di Kabupaten Bogor sebanyak 454 wajib pajak. Penerimaan pajak dari sektor perhotelan sampai bulan Desember 2020 sebesar Rp. 63.149.157.520,00 melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 47.442.844.000,00. Meskipun telah melebihi target, proses penerimaan pembayaran pajak hotel masih banyak terdapat permasalahan yang secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah. Salah satu faktornya yaitu kurangnya kesadaran atau kepekaan



wajib pajak hotel akan pentingnya membayar pajak. Hal ini dikarenakan sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah secara umum adalah *self assessment system*.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait sistem pembayaran pajak hotel untuk penulis jadikan bahan Tugas Akhir yang berjudul **“Sistem Akuntansi Penerimaan Pembayaran Pajak Hotel pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan terkait pemungutan pajak hotel di Bappenda Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana sistem akuntansi dalam penerimaan pembayaran pajak hotel di bappenda Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana bagan alir (*flowchart*) dari sistem akuntansi penerimaan pembayaran pajak hotel pada Bappenda Kabupaten Bogor?
4. Bagaimana sistem pengendalian internal di Bappenda Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan kebijakan terkait pemungutan pajak hotel di Bappenda Kabupaten Bogor.
2. Menguraikan sistem akuntansi penerimaan pembayaran pajak hotel di Bappenda Kabupaten Bogor.
3. Menguraikan prosedur dan bagan alir (*flowchart*) dari sistem akuntansi penerimaan pembayaran pajak hotel di Bappenda Kabupaten Bogor.
4. Menjelaskan sistem pengendalian internal di Bappenda Kabupaten Bogor.

1.4 Manfaat

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak yang terkait, adapun manfaat yang ingin diberikan adalah :

1. Bagi Sekolah Vokasi IPB
Untuk menambah referensi bagi perpustakaan Vokasi IPB.
2. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk pertimbangan agar dapat mengerti dan memahami rencana dan tujuan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas pendapatan Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak hotel.
3. Bagi Instansi
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan untuk pengamanan target penerimaan pajak hotel dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).